

PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT DESA DONOWARIH KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG DALAM PENINGKATAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN SENGON

Muttaqin T.

Staf Pengajar. Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian Peternakan,
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: tatag.umm@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan masyarakat kelompok tani hutan tanaman sengon dilaksanakan di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada bulan Agustus s.d November 2013. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk peningkatan pemanfaatan lahan milik rakyat untuk diversifikasi produk, terpeliharanya kondisi tata air dan lingkungan yang baik, khususnya lahan milik rakyat, memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna bahan baku kayu untuk industri, kayu pertukangan dan kayu energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Metode pengabdian yang digunakan adalah: penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Hasil dari pengabdian ini adalah mulai terbentuknya kesadaran pada kelompok tani hutan tanaman sengon untuk berperan dalam konservasi lahan, hal ini dibuktikan dengan tingginya minat kelompok tani hutan dalam budidaya tanaman sengon dengan penerapan teknologi kehutanan.

Saran dan solusi dari permasalahan yang ditemui di lapangan adalah perlu penetapan model pengelolaan hutan yang tepat dengan mengikutsertakan kelompok tani pemilik lahan dan instansi pemerintah terkait dan terus diupayakan penyuluhan bagi kelompok tani pemilik lahan agar lebih yakin bahwa petani akan mendapatkan manfaat yang maksimal bila pohon yang ditanam dan dipelihara dengan baik serta dipanen pada masanya nanti (umur masak tebang). Dengan demikian tanpa paksaan pun petani mau menanam kembali lahan bekas tebang tersebut agar dapat dipanen pada periode berikutnya. Hal ini perlu dukungan semua pihak yang terkait.

Kata Kunci: Kelompok Tani, Hutan Rakyat, Budidaya, Tanaman Sengon

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu pertukangan, pulp dan paper, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi serta sebagai produsen oksigen.

Keberadaan hutan ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan

menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak diperbolehkan mengubah fungsi utamanya.

Perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat, hal ini berkaitan dengan semakin terasanya kekurangan hasil kayu dari kawasan hutan negara, baik hasil kayu sebagai kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Selain

itu pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, juga sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Penanaman pepohonan di tanah milik masyarakat oleh pemiliknya, merupakan salah satu butir kearifan masyarakat dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan semakin terbatasnya kepemilikan tanah, peran hutan rakyat bagi kesejahteraan masyarakat semakin penting. Pengetahuan tentang kondisi tanah dan faktor-faktor lingkungannya untuk dipadukan dengan pengetahuan jenis-jenis pohon yang akan ditanam untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh pemilik lahan, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan rakyat.

Penanaman hutan rakyat dengan mengkombinasikan tanaman perkayuan dengan tanaman MPTS berupa pangan/palawija yang biasa dikenal dengan istilah agroforestry. Pola pemanfaatan lahan seperti ini banyak manfaatnya, antara lain : meningkatkan pendapatan per satuan lahan, erosi dapat ditekan, hama dan penyakit lebih dapat dikendalikan, biaya perawatan tanaman dapat dihemat, waktu petani di lahan lebih lama.

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Pada dasarnya setiap kegiatan tentu akan menimbulkan problem dan pemmasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani hutan rakyat baik yang sifatnya teknis maupun non teknis. dengan adanya pendampingan penyuluhan lahan dan penguatan kelembagaan memberikan pembelajaran pada kelompok tani. Permasalahan yang dihadapi dari Kelompok Tani adalah :

a. Faktor Teknis

1. Masih kurangnya pengetahuan petani dalam mengelola dan memanfaatkan lahan dengan kaidah-kaidah konservasi
2. Wawasan petani tentang konservasi masih rendah, sehingga belum terpikirkan bila terjadi bencana alam.
3. Bagaimana memasarkan hasil lahan

b. Faktor Non Teknis

1. Wadah kelompok tani belum sesuai dengan fungsinya, dan kegiatan petani masih individual.
2. Kelembagaan kelompok tani dan SDM petani yang masih perlu pembinaan dari pihak –pihak terkait.
3. Administrasi kegiatan kelompok belum tersusun secara sistematis.

Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan pengabdian adalah :

1. Peningkatan pemanfaatan lahan milik rakyat untuk diversifikasi produk
2. Terpeliharanya kondisi tata air dan lingkungan yang baik, khususnya lahan milik rakyat.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna bahan baku kayu untuk industri, kayu pertukangan dan kayu energi
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan dilakukan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat antara lain :

1. Makin kuat dan majunya kelompok atau lembaga tani hutan rakyat yang merupakan pranata sosial dalam sistem perilaku dan hubungan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat yang meliputi beberapa komponen yaitu : organisasi sebagai wadah lembaga, fungsi lembaga dan perangkat peraturan yang ditetapkan oleh lembaga masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan cara peningkatan kemampuan, kemandirian dan kepedulian atau partisipasi masyarakat terhadap konservasi tanah dan air lingkungannya, sehingga akan tercipta iklim yang lebih baik.
3. Mengurangi masa bero lahan yang relatif lama, sehingga berpengaruh terhadap erosi, menurunnya tingkat kesuburan tanah dan merosotnya hasil panen di daerah-daerah yang

- padat penduduknya yang menuntut petani untuk mempersingkat masa bero.
4. Mengurangi eksploitasi hutan yang berlebihan dan terkurasnya sumber daya alam mengakibatkan produksi tidak dapat lestari.
 5. Mendorong sistem pertanian dari subsisten ke arah sistem yang lebih mementingkan tanaman pangan, kayu dan ternak serta ikan sebagai sumber penghasilan masyarakat.

Kerangka Pemecahan Masalah

Pengelolaan hutan rakyat akan mengalami perkembangan secara dinamis, sesuai dengan perkembangan sosial budaya maupun tingkat iptek yang dikuasai oleh masyarakat. Pengembangan hutan rakyat, disamping penciptaan kondisi yang baik oleh pemerintah perlu dicari atau ditumbuhkan adanya “aktor sosial” diberbagai tingkatan dan bidang keahlian. Para peneliti, termasuk Perguruan Tinggi, LSM dan lembaga-lembaga lain diharapkan dapat menyumbangkan perannya masing-masing guna memecahkan permasalahan yang ada meliputi :

1. Instansi pemerintah harus mengambil bagian dalam membina dan menjalin kerja sama dengan para aktor sosial perlu adanya kesepakatan, persamaan persepsi dan saling pengertian, sehingga akan tercipta kesatuan tujuan yaitu : meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan atau di dalam hutan melalui pemanfaatan sumber daya alam hutan.
2. Pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan prakarsa bersama dan berlanjut dengan jalan memberikan motivasi, mendidik serta mengembangkan kesadaran masyarakat bahwa sumberdaya alam merupakan dasar produksi pangan, bagian pokok dari system penunjang kehidupan global harus dapat dipergunakan secara berkelanjutan dan lestari, sehingga kita wajib dilindungi dan dilestarikan sumberdaya alam tersebut.
3. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam menemukan dan menerapkan cara-cara melestarikan dan melindungi lingkungan hidup yang rentan.
4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk berkembang kembali dengan cara

- menghentikan pengrusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan mengembangkan kemampuan sumberdaya alam untuk pulih kembali.
5. Meningkatkan dukungan jaringan kerja dan hubungan yang harmonis yang dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pelayanan pemerintah maupun swasta.

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan Agustus s.d. November 2013 pada kelompok tani pemilik lahan di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kab. Malang.

Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam kegiatan ini diutamakan bagi kelompok tani hutan yang berjumlah 60 kepala keluarga, karena pada umumnya kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Metode Kegiatan

Untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi kelompok tani Desa Donowarih agar tercapai tujuan yang telah direncanakan menggunakan metode sbb :

1. Penyuluhan
2. Pelatihan
3. pendampingan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Penyuluhan pentingnya lahan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pelatihan pembuatan pupuk bokasi dan pestisida alami yang terdiri dari teori 30% dan praktek 70%, dalam kegiatan ini diharapkan petani bisa menghemat anggaran untuk pengolahan lahan.

3. Pengenalan jenis-jenis tanaman kayu yang memiliki nilai ekonomis dan konservasi lingkungan.
4. Pendampingan dengan sistem kunjungan langsung ke lokasi lahan yang berisikan pembinaan teknis maupun dinamika masalah yang terjadi di lapangan.
5. Pengembangan kelompok tani dengan mendirikan sub-sub kelompok pendukung melalui kegiatan pengkaderan.

3. Evaluasi kemajuan kelompok tani dengan mengajak kelompok tani untuk studi banding ke kelompok tani mandiri di daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun deskripsi wilayah kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

Desa Donowarih merupakan salah satu desa di wilayah kec. Karangploso Kabupaten Malang, dengan luas wilayah Desa: 886,712 Ha. Desa Donowarih berbatasan dengan Desa Tawang Argo disebelah Utara, Desa Bocek disebelah Selatan, Desa Giripurno disebelah Barat, dan Desa Ngenep disebelah timur.

Topografi Desa Donowarih memiliki ketinggian : 300-600m dpl, datar (0-8%) : 76,850 Ha, landai (8-15%) : 182, 9586 Ha, agak curam (15-25%) : 182, 9586 Ha, curam (25-40%) : 234, 9448 Ha, sangat curam (>40%) Ha, dengan tingkat kesuburan tanah : kurang subur/ sedang/ subur, tebal solum tanah : 20-40 cm, tekstur tanah : liat berpasir, struktur tanah : remah.

Adapun pemanfaatan lahan Desa Donowarih disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pemanfaatan Lahan Desa Donowarih

No	Pemanfaatan lahan	Luas (Ha)	Jenis	Kondisi Kerapatan & Kesuburan
1.	Tanaman tahunan:			
	- Tanaman kehutanan	79	Sengon, jabon, Mindi	
	- Tanaman perkebunan			
	- Tanaman campuran	304, 712	Jati, durian, jengkal, alpokat	
2.	Tanaman semusim	367	Jagung, kelapa,	
3.	Lahan terlantar	1	Kopi	
4.	Lain- lain:	25		
	-Bangkok	15		
	- capi, mahoni	5		

Adapun kondisi bangunan konservasi tanah dan air Desa Donowarih disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Bangunan Konservasi Tanah dan Air

No	Jenis bangunan	Luas/ unit	Keterangan
1.	Terasiring		
	- Teras individu		
	- Teras glud/ kredit	394,712	Sawah
	- Teras bangku	467	
	- Teras kebun	267	Lahan kering
	- Tanpa teras	25	

2.	Gully plug	0
3.	Dam penahan	0
4.	Dam pengendali	0
5.	Sumur resapan	0
6.	Embung	0

Penggunaan lahan Desa Donowarih disajikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Desa Donowarih

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	22, 831
2.	Sawah	76, 850
3.	Tegal/ Kebun	583, 034
4.	Perkebunan	-
5.	Hutan	200
6.	Padang rumput/ rawa	-
7.	Tambak	-
8.	Lain- lain	3, 997
Jumlah		886, 712

Kondisi hamparan lokasi/ jenis erosi yang ada di Desa Donowarih yaitu : erosi permukaan : 25 Ha, erosi parit : 0 Ha, erosi jurang : 20 Ha, erosi tepi sungai : 15 Ha, tanah longsor : 0 Ha.

Kelompok Tani Desa Donowarih memiliki struktur organisasi sbb:

- Kelompok Tani : Sri Lestari
- Pelindung : Bpk. Kepala Desa
- Pembina : PKL dan PT
- Nama Ketua Kelompok Tani : Mustaqim
- Nama Sekretaris : Supateno
- bendahara : Ramin
- Seksi- seksi:
 - a. Tanaman Pangan : Darianto
 - b. Konservasi : Bakri
 - c. Pembibitan : Kasiono
 - d. HR : Slamet

Pengelolaan hutan rakyat masih sangat tergantung pada pemilik lahan begitu juga penentuan jenis pohon yang akan ditanam, karena petani menginginkan jenis pohon tertentu untuk ditanam di lahan miliknya. Hal ini dapat menghambat pemerataan jenis tanaman di lahan hutan rakyat.

Rata-rata tingkat pertumbuhan pohon di Desa Donowarih mencapai tinggi (70–80%), namun di beberapa tempat dijumpai tingkat pertumbuhan pohon kurang/tidak berhasil karena penanaman pohon yang tidak sesuai dengan musim tanam. Selain itu kualitas

bibit yang ditanam tidak memenuhi syarat sehingga selain banyak bibit yang mati sebelum ditanam, bibit yang bisa tumbuh dewasa kualitas hasilnya kurang baik. Hal ini terkait dengan program rehabilitasi hutan dan lahan yang *notabene* sebuah proyek yang sering terkendala masalah administrasi dan bahkan mungkin terhenti begitu saja.

Di Desa Donowarih sulit mengendalikan kegiatan penebangan pohon yang dilakukan di lahan hutan rakyat. Hal ini terkait dengan belum adanya landasan hukum (Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah) yang mengatur kegiatan pemanenan tersebut. Terlebih lagi bila masyarakat pemilik lahan dihadapkan pada persoalan ekonomi, masyarakat akan menjualnya tanpa memperhatikan apakah pohon tersebut masih muda atau sudah bisa dipanen, yang penting ada pedagang yang mau membelinya.

Tidak mudah memberi pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan hutan rakyat di Desa Donowarih. Hal ini terkait dengan banyaknya pihak yang memegang andil dalam pengelolaan tersebut, seperti pemilik lahan, instansi terkait, pihak swasta, maupun pemerintah. Namun demikian beberapa solusi terhadap permasalahan tetap ada. Perlu penetapan model pengelolaan hutan yang tepat dengan mengikutsertakan kelompok tani pemilik lahan dan instansi pemerintah terkait. Hal ini ditujukan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan hasilnya, bukan hanya hasil kayu yang baru bisa dipanen dalam waktu yang cukup lama tetapi juga dapat merasakan

hasil hutan ikutan, seperti tanaman tumpangsari dan palawija, yang dapat dipanen lebih awal. Dengan demikian tanaman pokok dapat dipelihara dengan baik dan dipanen pada waktunya bukan ditebang sebelum “cukup umur.”. Namun demikian perlu juga dipikirkan jenis tanaman yang cocok manakala tanaman pokok sudah tumbuh besar sehingga menghalangi sinar matahari masuk ke areal yang ada di bawahnya. Kalau ini terjadi model tumpangsari susah dilakukan. Jika hal ini terjadi di lahan milik negara yang dikelola masyarakat, pola kemitraan bagi hasil kayu dapat ditempuh. Dengan pola bagi hasil ini petani penggarap lahan tetap dapat merasakan hasil keuntungan dari tanaman yang sudah bertahun-tahun mereka pelihara.

Bagi pemerintah sendiri, pemeliharaan dan keamanan kayu dapat terjamin sehingga pohon dapat dipanen sesuai umur tebangnya. Sementara itu bila terjadi di lahan hutan milik masyarakat, biasanya mereka menanam lahan sela dengan tanaman semusim, seperti pohon melinjo, mete, dll sehingga mereka dapat memetik hasil sampingan dari tanaman semusim tersebut. Pada prinsipnya dalam penghijauan di lahan hutan milik masyarakat ini pemerintah hanya mengambil keuntungan dari aspek ekologis atau pelestarian lingkungan saja, sedang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik lahan.

Pemerintah tetap memfasilitasi penyediaan bibit tanaman yang berkualitas di Desa Donowarih agar tingkat pertumbuhan pohon tinggi sehingga kayu yang dihasilkan berkualitas baik. Bila perlu kelompok tani pengolah lahan hutan dibekali pengetahuan cara pembibitan yang baik sehingga dapat menyediakan bibit yang berkualitas. Dengan demikian bila “proyek yang difasilitasi pemerintah” terhenti di tengah jalan, mereka tetap bisa mandiri melanjutkan penghijauan lahan-lahan hutan di Desa Donowarih.

Pemerintah diharapkan segera mengesahkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah yang mengatur pola pemanenan kayu terutama di lahan hutan milik masyarakat agar penebangan pohon dapat dikendalikan meskipun di lahan hutan milik sendiri. Selain untuk mencegah terjadinya penggundulan hutan, diharapkan juga dapat mengatur pola penebangan pohon dengan tebang pilih, yaitu memilih pohon yang benar-benar sudah saatnya ditebang dan menghindari pohon yang belum saatnya ditebang. Sosialisasi proses perijinan penebangan kayu yang berasal dari hutan rakyat yang berlaku sangat diperlukan supaya tidak

menyulitkan dan merugikan masyarakat pemilik lahan khususnya di Desa Donowarih.

Selaku pelaksana pendampingan terus mengupayakan penyuluhan bagi kelompok tani pemilik lahan agar lebih yakin bahwa akan mendapatkan manfaat yang maksimal bila pohon yang ditanam dipelihara dengan baik dan dipanen pada umur masak tebang. Dengan demikian tanpa paksaan pun petani menanam kembali lahan bekas tebang tersebut agar dapat dipanen pada periode berikutnya. Hal ini perlu dukungan semua pihak yang terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Pengembangan pengelolaan hutan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan perlu dukungan semua pihak dan peran aktif masyarakat.

1. Partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan pendampingan budidaya tanaman mencapai 85%.
2. Aktifitas anggota kelompok tani dalam setiap kegiatan pendampingan budidaya tanaman sangat tinggi.
3. Telah tumbuh kesadaran anggota kelompok tani dalam pemanfaatan lahan yang dimilikinya untuk tanaman sengon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, R. dan D. Suharjito. 1995. **Peranan Pusat Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Penyuluhan Kehutanan**. Makalah Pertemuan teknis Penyuluhan Kehutanan, Bogor 7-8 Agustus 1995.
- Garrity, D.P. 1984. **Agroforestry and Sustained Productivity of Asia Humid Uplands**. P.225-234. In *Bottema, J.W.T. and Stoltz, D.R. eds. Uplands Agriculture In Asia*. Bogor. CGRPRT. Centre.

Nair, T.K.R. 1989. **Agroforestry System In The Tropic**. P. 1-8. Kluwer Academic In Cooperation With ICRAF, Nairobi, Kenya.

North DC. 1995. **The new institutional economics and third world development**. In: Harris J, Hunter J and Lewis C. (eds.). 1995. *The New Institutional Economics and Third*

Ostrom E. 1986. **A method of institutional analysis**. In Kaufmann, F.X., G. Majone and V.

Ostrom (eds.). 1986. **Guidance, Control and Evaluation in the Public Sector**. De Gruyter. Berlin and New York.

Suharjito, Didik. 1998. **Kelembagaan Lokal Pemanfaatan Sumberdaya Alam: Studi Kasus Pada Orang Mioko-Mimika Timur, Irian Jaya**. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.

Satjapradja. 1981. **Prosiding Seminar Agroforestry dan Pengendalian Perladangan Berpindah**. Kerjasama DITSI dengan BPH. Jakarta.

Wiersum KF. 1982. **Tree Gardening and Taungya on Java: Examples of Agroforestry Techniques in the Humid Tropic**. *Agroforestry Systems* 1: 53 – 70.



Gambar 2. Bersama penyuluh kehutanan memberikan pembinaan kepada kelompok tani



Gambar 1. Berdialog dengan anggota kelompok tani



Gambar. 3. Bahan penyuluhan (Sengon terserang penyakit)